

CIPS


Center for Indonesian
Policy Studies

Pelarangan Merugikan Masyarakat Yang Lemah

**Dampak Kebijakan Pelarangan
atas Konsumen Irasional**

Oleh Jeffrey Miron (Harvard University)

www.cips-indonesia.org



Edisi Bahasa Indonesia ini diterjemahkan dari tulisan berjudul *Does Consumer Irrationality Justify the War on Drugs?* oleh Jeffrey Miron, diedit oleh Tom G. Palmer dan diterbitkan oleh Atlas Network, Students for Liberty dan Jameson Books, Inc.

Syarat dan ketentuan dapat diakses melalui <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

Hak Cipta ©2016 oleh Atlas Network dan Tom G. Palmer

Pelarangan Merugikan Masyarakat Yang Lemah
Dampak Kebijakan Pelarangan atas Konsumen Irasional

Author:

Jeffrey Miron (Harvard University)

Jakarta, Indonesia

October 2016

Hak Cipta ©2016 oleh Atlas Network dan Tom G. Palmer

Pengantar

Pertanyaan refleksi untuk mengawali bagian ini adalah, apakah pernah terjadi suatu masa di mana kendali penuh oleh negara akan menghasilkan kondisi yang lebih baik daripada pengendalian diri yang dilakukan oleh individu?

Pada tipe konsumen yang rasional (*rational consumer*), jawaban atas pertanyaan tersebut adalah tidak pernah. Tipe ini mengasumsikan bahwa konsumen akan selalu mengetahui beragam pilihan bagi diri mereka sendiri, mempunyai semua informasi yang relevan tentang pilihan tersebut untuk kemudian dapat mengolah informasi tersebut secara tepat, dan pada akhirnya dapat membuat keputusan yang konsisten dari waktu ke waktu. Campur tangan pemerintah atas pilihan-pilihan individu – yang dinilai sebagai bentuk perubahan dari kontrol pribadi menjadi kontrol negara, hanya akan merugikan masyarakat, yang seharusnya bisa membuat keputusan terbaik bagi dirinya.

Paradigma konsumen yang rasional memiliki sejarah yang panjang. Banyak ahli ekonomi masih memandang bahwa paradigma tersebut sangat berguna sebagai salah satu pendekatan yang menjelaskan kondisi positif dan normatif. Namun sebagian ahli ekonomi dan non-ekonomi yang lain mempercayai bahwa konsumen tidak sepenuhnya rasional. Penilaian ini dibangun berdasarkan observasi langsung pada perilaku individu dan penelitian eksperimental khususnya dalam bidang psikologi dan ekonomi yang dilakukan untuk mematahkan teori konsumen rasional.¹

Apabila konsumen tidak sepenuhnya rasional, diskusi tentang kontrol oleh individu dan kontrol oleh negara mungkin akan tampak tidak menarik. Intervensi pemerintah tidak secara otomatis akan mempengaruhi keputusan konsumen irasional, karena konsumen irasional mungkin membuat keputusan yang tidak tepat atas kemauan mereka sendiri. Akan tetapi, saya berpendapat bahwa irasionalitas konsumen justru akan memperkuat argumen

“Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, “Perang terhadap Narkoba” pada akhirnya masih tergolong kebijakan yang keliru—dan hal tersebut akan menjadi semakin buruk jika ada konsumen yang irasional. Kebijakan tersebut mungkin dapat mencegah beberapa penyalahgunaan narkoba, tapi dampak lebih luasnya akan merugikan konsumen tipe irasional dibandingkan dengan konsumen rasional.”

pengendalian diri oleh individu (*self-control*), bukan sebaliknya. Dalam hal ini argumen yang saya berikan adalah dalam konteks “Perang terhadap Narkoba”— upaya jangka panjang pemerintah Amerika Serikat (US) untuk melarang ganja, kokain, heroin dan zat memabukkan lainnya. Jika konsumen berperilaku rasional dalam penggunaan obat-obatan terlarang, maka pelarangan terhadap narkoba akan memperburuk konsumsi pengguna narkoba. Tetapi jika benar konsumen tidak selalu rasional, larangan terhadap narkoba mungkin dapat mencegah beberapa keputusan yang salah dalam penggunaan obat-obatan yang tidak aman, sehingga larangan terhadap narkoba dapat dipertimbangan sebagai langkah kebijakan yang tepat.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, “Perang terhadap Narkoba” pada akhirnya masih tergolong kebijakan yang keliru—dan hal tersebut akan menjadi semakin buruk jika ada konsumen yang irasional. Kebijakan tersebut mungkin dapat mencegah beberapa penyalahgunaan narkoba, tapi dampak lebih luasnya akan merugikan konsumen tipe irasional dibandingkan dengan konsumen rasional. Pengendalian diri individu sebagai pendekatan terhadap masalah narkoba mungkin tidaklah sempurna, namun pengendalian oleh negara akan jauh lebih buruk.

Kerangka Perdebatan “Perang terhadap Narkoba”

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pengaruh rasionalitas konsumen terhadap kebijakan pelarangan maupun kebijakan legalisasi, saya akan menjelaskan apa yang disebut oleh ahli ekonomi sebagai analisis “positif” dari pelarangan, yaitu yang menggambarkan dampak dari pelarangan tanpa terlebih dahulu membahas apakah pelarangan tersebut betul-betul diperlukan.

Pelarangan peredaran narkoba tidak menghilangkan pasar untuk konsumsi obat-obatan terlarang. Sejumlah fakta dari kajian yang telah dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan narkoba, alkohol, perjudian, prostitusi dan jasa-komoditas lainnya menunjukkan bahwa pasar bagi narkoba akan tetap bertahan, meskipun berada di bawah pelarangan yang tengah diupayakan. Bukannya menghilangkan pasar narkoba, pelarangan malah mendorong adanya pasar gelap obat-obatan (*underground*).²

Pelarangan dapat saja mengurangi penggunaan narkoba dibandingkan kebijakan legalisasi. Dari sisi permintaan, pelarangan akan menegaskan hukuman bagi kepemilikan barang terlarang. Akibatnya, beberapa konsumen akan menjauhkan diri dari narkoba demi “menghormati hukum” dan sebagian konsumen yang lain mungkin menjauhkan diri karena takut tertangkap dan dikenai hukuman.

Dari sisi penawaran, pelarangan akan meningkatkan biaya produksi dan distribusi karena pemasok harus mengeluarkan sumber daya lebih banyak untuk menghindari deteksi penegak hukum; hal ini mengakibatkan kenaikan harga dan juga berkurangnya konsumsi narkoba.³ Dampak langsung dari sisi permintaan-penawaran tersebut tidaklah besar.

Pelarangan bisa mendorong naiknya permintaan karena terdapat reputasi “buah terlarang”; sebagian orang berpendapat, jika narkoba dilarang, maka kualitasnya haruslah sangat baik. Oleh karena produksi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, produsen dan distributor di pasar gelap mendapatkan ongkos yang lebih rendah dan tanpa dibebani pajak dan peraturan—ongkos akan dialihkan pada biaya akan kerahasiaan yang harus dijamin. Selain itu, perbedaan situasi pada kemampuan penjual narkoba untuk mengiklankan produknya, pembiayaan iklan, dan jangkauan pasar di dalam kondisi pelarangan, dibandingkan legalisasi, mungkin juga membatasi dampak terhadap penggunaan narkoba.⁴

Bukti yang ada menyatakan dampak pelarangan terhadap penggunaan narkoba adalah kategori sedang.⁵ Ini termasuk menjangkau jenis narkoba dan alkohol yang berbeda di lintas negara dan dalam beberapa periode waktu. Bukti atas pertanyaan ini tidaklah utuh, karena walaupun sebagian masyarakat telah beralih dari pelarangan terhadap narkoba menjadi legalisasi penuh, tetapi banyak orang mengurangi pelarangannya secara substansif. “Penurunan pelarangan” ini dikaitkan dengan peningkatan penggunaan narkoba secara kecil atau hampir tidak terdeteksi. Terlepas dari dampak atas penggunaan narkoba, lebih dari itu, pelarangan juga memiliki banyak efek yang tidak diinginkan.

Pelarangan meningkatkan kriminalitas dan kekerasan. Hal ini karena pasar legal akan menyelesaikan sengketa menggunakan pengadilan dan mekanisme anti-kekerasan. Sebaliknya, pelaku pasar gelap akan menggunakan kekerasan dan tidak mungkin mengadukan atau melaporkan ke pihak berwenang karena kegiatan pasar gelap akan mengungkapkan identitas dan kegiatan mereka, dan pengadilan tidak akan menyelesaikan kasus kontrak dagang yang melibatkan barang ilegal. Oleh karena itu, meskipun penjual resmi saling bersaing merebut

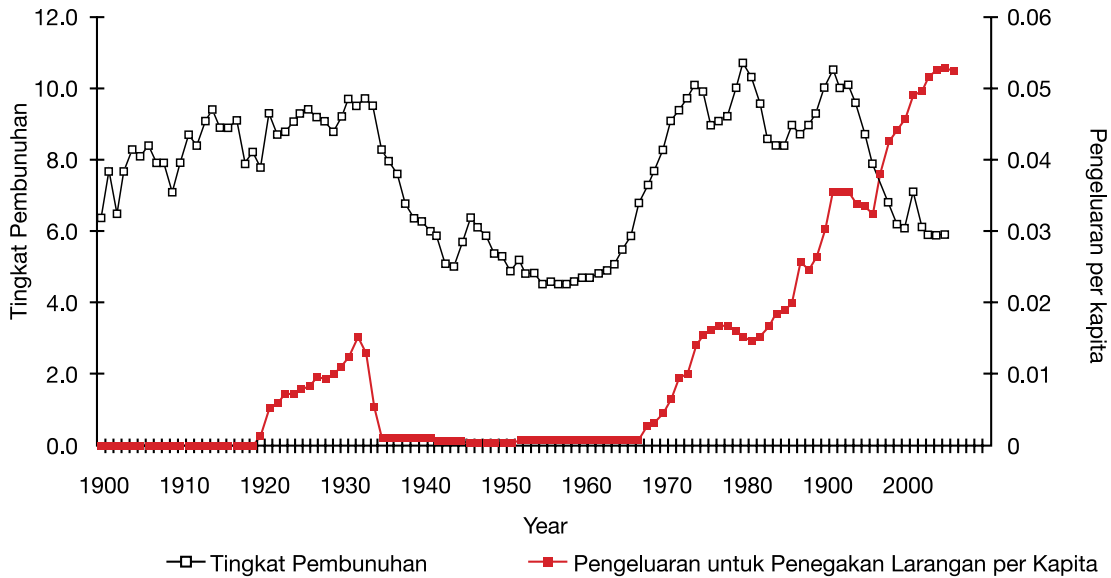
konsumen melalui promosi iklan, penjual di pasar gelap akan tetap mengandalkan pertarungan dan kekerasan.

“Bukti penting juga menegaskan bahwa pelarangan telah menimbulkan kekerasan. Penggunaan kekerasan dalam penyelesaian konflik merupakan hal umum yang terjadi di pasar gelap narkoba dan prostitusi, seperti yang pernah terjadi di dunia perjudian sebelum munculnya lotere yang dikelola negara dan perluasan judi legal selama beberapa dekade

Bukti penting juga menegaskan bahwa pelarangan telah menimbulkan kekerasan.⁶ Penggunaan kekerasan dalam penyelesaian konflik merupakan hal umum yang terjadi di pasar gelap narkoba dan prostitusi, seperti yang pernah terjadi di dunia perjudian sebelum munculnya lotere yang dikelola negara dan perluasan judi legal selama beberapa dekade terakhir. Selama seabad yang lalu, kekerasan telah meningkat dan menurun mengikuti penegakan hukum atas pelarangan narkoba dan alkohol, seperti yang dijelaskan pada grafik 1.⁷ Di berbagai negara, kekerasan meningkat terutama di negara yang memproduksi dan mengekspor obat terlarang, seperti kokain dan heroin.⁸

Pelarangan juga mendorong aktivitas kriminal penghasil uang seperti pencurian dan prostitusi, yang disebabkan oleh peningkatan harga narkoba sehingga konsumen harus mendapatkan penghasilan tambahan untuk membelinya.⁹ Pelarangan juga mengalihkan sumber daya sistem penegakan hukum dari pencegahan atas semua jenis kejahatan.¹⁰

Gambar 1. Pengeluaran untuk larangan-larangan per kapita dan tindakan pembunuhan per 100.000: tahun 1900 hingga 2006



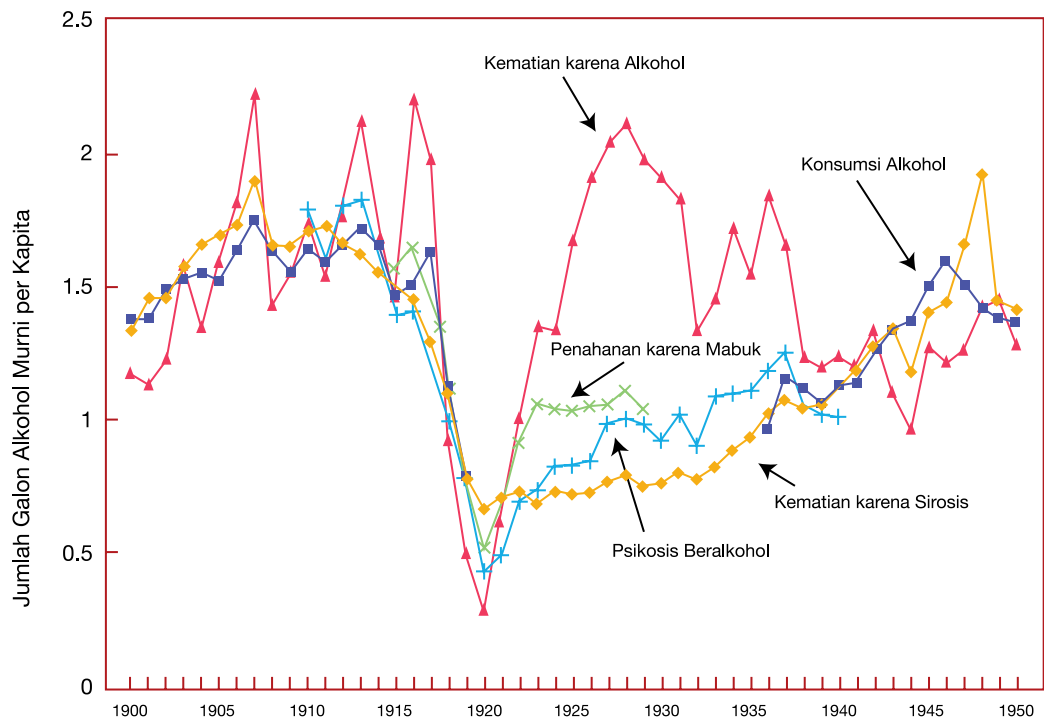
Sumber: Tingkat pembunuhan dari FBI UCR (di tahun yang berbeda-beda). Proyeksi pengeluaran untuk penegakan larangan berdasarkan Miron (1999) dan data dari *Budget of the United States Government* (di tahun yang berbeda-beda).

Kesimpulan yang menyatakan bahwa pelarangan menyebabkan kriminalitas bertentangan dengan klaim yang dikemukakan oleh pendukung argumen pelarangan ini, bahwa penggunaan narkoba menyebabkan kejahatan. Hanya sedikit bukti yang dapat menegaskan klaim bahwa penggunaan narkoba akan mendorong tingkat kekerasan atau tindak kejahatan lainnya.¹¹

Pelarangan juga menurunkan kualitas dan ketahanan suatu produk. Di pasar resmi, ketika konsumen mendapati barang yang dibeli ternyata sudah rusak maka konsumen dapat “menghukum” penjual melalui tuntutan berbentuk klaim, mempublikasikan keburukan penjual, tidak membeli lagi barang yang sama terhadap penjual yang sama atau mengadukannya kepada kelompok pengawas usaha maupun pemerintah. Di pasar gelap, mekanisme tersebut tidak tersedia atau tidak efektif, sehingga pelarangan justru menyebabkan masalah kesehatan berupa overdosis dan keracunan.¹² Pelarangan alkohol di AS memberikan contoh klasik, ketika kematian akibat alkohol palsu melonjak; lihat gambar 2.¹³ Demikian pula, kasus pengguna ganja yang jatuh sakit pada tahun 1970-an setelah pemerintah AS menyemprotkan *herbisida paraquat* pada ladang ganja di Meksiko. Meskipun demikian, ganja-ganja tersebut masih dipanen dan didistribusikan kepada konsumen di AS.¹⁴

Pelarangan juga menimbulkan korupsi. Di pasar resmi, pelaku pasar memiliki insentif dalam jumlah yang terbatas untuk menyuap aparat penegak hukum karena memiliki mekanisme legal seperti lobi atau kontribusi kampanye untuk ikut mempengaruhi politisi. Di pasar gelap, para pelaku harus memilih antara menghindari penegak hukum atau membayar penegak hukum agar mereka tidak tertangkap. Selain itu, teknik lobi juga jauh lebih sulit dilakukan di pasar gelap.¹⁵

Gambar 2. Estimasi Jumlah Galon Alkohol Murni yang Dikonsumsi per Kapita



Grafik ini menunjukkan data perhitungan konsumsi alkohol per kapita di tahun-tahun yang tidak terdapat pelarangan dan data estimasi konsumsi alkohol per kapita di semua tahun. Estimasi tersebut berasal dari regresi setiap seri proxy (misalnya, tingkat kematian sirosis) pada sebuah konstanta, tren linear, dan konsumsi aktual alkohol per kapita. Data yang digambarkan dalam grafik tersebut kemudian menyiratkan estimasi konsumsi alkohol per kapita di semua tahun dengan membalikkan estimasi regresi untuk mengestimasi konsumsi alkohol di tahun-tahun Pelarangan dengan berdasarkan pada proxy dan estimasi hubungan antara proxy dengan konsumsi alkohol. Estimasi dan prosedur pembalikan (inversi) mengubah unit-unit dari setiap proxy menjadi unit dalam jumlah galon dari konsumsi alkohol per kapita.

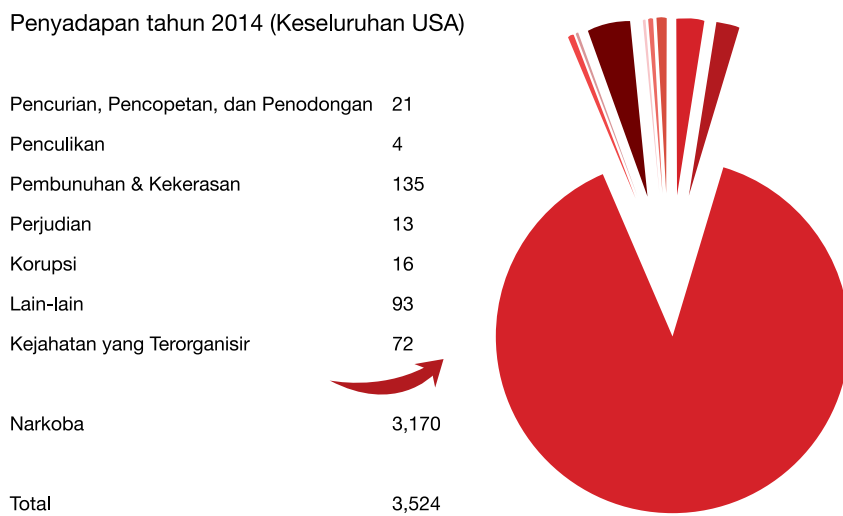
Pelarangan memperkaya orang-orang yang paling sering melanggar hukum di masyarakat. Dalam mekanisme pasar resmi, pendapatan dari produksi dan penjualan narkoba akan dikenakan pajak; dan pemasukan tersebut akan memengaruhi setiap orang melalui pajak lainnya yang lebih rendah atau belanja pemerintah yang lebih tinggi. Di pasar gelap, penjual menjadikan pendapatan tersebut sebagai keuntungan. Diperkirakan selama ini uang yang dapat dikumpulkan pemerintah federal, negara bagian, dan pemerintah lokal sekitar US\$50 miliar per tahun apabila narkoba dilegalkan.¹⁶

Pelarangan memiliki konsekuensi tambahan yang merugikan. Karena kejahatan narkoba melibatkan pertukaran yang saling menguntungkan, para pelaku tidak akan melaporkan kejahatannya ke polisi; dimana pihak kepolisian akan menggunakan beberapa strategi penyamaran seperti; sebagai pembeli, penyitaan aset, penyeragaman tanpa surat perintah, penggeledahan, dan investigasi rasial, yang semuanya sulit diterima oleh prinsip-prinsip kebebasan sipil.¹⁷ Lebih luas lagi, perang terhadap narkoba telah memicu berbagai taktik penegakan hukum yang menyerang ruang privat, seperti penyadapan kehidupan pribadi¹⁸ (lihat

Gambar 3). Karena pelarangan, banyak pemerintah negara bagian tidak memperbolehkan penjualan jarum suntik bersih lintas negara, di mana hal tersebut akan meningkatkan pemakaian kembali jarum suntik bekas dan tindakan berbagi jarum suntik antar pengguna narkoba; di mana hal tersebut mendorong penyebaran virus HIV dan penyakit lain melalui darah.¹⁹ Selain itu, karena pelarangan, penggunaan ganja dikontrol secara lebih ketat daripada morfin atau kokain, sehingga tidak dapat digunakan untuk kepentingan medis.²⁰ Demikian pula, dokter akan kehilangan lisensi medisnya atau bahkan mendapatkan hukuman penjara atas resep “berlebihan” yang menimbulkan candu; hal tersebut akan mendorong banyaknya perawatan atas sakit kronis.

Dampak pelarangan artinya juga berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri dan negosiasi perdagangan bebas khususnya terkait dengan keputusan tentang kebijakan obat-obatan.²² Meluasnya ketidakpatuhan terhadap pelarangan meskipun dengan penegakan hukum yang tegas, memberikan sinyal kepada pengguna maupun non-pengguna bahwa hukum ditujukan untuk orang yang mudah diperdaya, sehingga pada akhirnya merusak semangat kesadaran masyarakat akan kepatuhan yang sangat penting bagi terwujudnya masyarakat yang merdeka. Ditambah lagi, pengeluaran negara untuk kepolisian, hakim, jaksa maupun penjara di semua tingkatan pemerintahan dari pusat hingga daerah dalam menegakkan kebijakan larangan narkoba setidaknya dapat menghabiskan US\$ 50 miliar per tahunnya di Amerika Serikat saja.²³ Ringkasnya, jika dibandingkan dengan kebijakan legalisasi, pelarangan mungkin relatif dapat mengurangi penggunaan narkoba. Akan tetapi sekalipun pengurangan tersebut berjumlah besar ataupun kecil, pelarangan lebih berdampak buruk pada peningkatan kejahatan, pengurangan tingkat kesehatan, korupsi yang lebih besar, ancaman terhadap kebebasan sipil, menghilangkan penerimaan pajak, dan biaya pengeluaran yang cukup besar.

Gambar 3. Kasus-kasus Pelanggaran Berat yang Diberikan Wewenang oleh Pengadilan untuk Melakukan Penangkapan (Penyadapan), 2014



Sumber: uscourts.gov

Apakah Kebijakan Pelarangan Diinginkan?

Dengan analisis positif sebagai latar belakang, saya juga ingin mempertanyakan apakah pelarangan merupakan kebijakan yang baik. Ini yang disebut ahli ekonomi sebagai analisis normatif: salah satunya menanyakan apakah pelarangan lebih baik dibandingkan kebijakan legalisasi, yang kemudian mengambil analisis positif tertentu dari perbedaan antara dua kebijakan (pelarangan atau legalisasi).

Analisis positif telah menunjukkan bahwa sebagian besar dampak dari pelarangan adalah dampak yang tidak diinginkan. Pengecualian dampak buruk yang mungkin diambil dari pelarangan adalah mengurangi penggunaan narkoba. Maka, analisis perbandingan antara pelarangan dan legalisasi mungkin akan muncul untuk membuat kebijakan yang seharusnya mendorong penurunan konsumen narkoba, serta mendorong konsumen membuat keputusan yang rasional dalam mengonsumsi narkoba. Faktanya, kesimpulan normatif yang tepat adalah kesimpulan yang tidak bersandar pada rasionalitas konsumen.

Jika semua konsumen diasumsikan sepenuhnya rasional, analisis normatif atas pelarangan narkoba adalah hal yang sederhana.²⁴ Dalam hal ini, semua efek pelarangan seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah tak diinginkan; karena setiap dampak pengurangan penggunaan narkoba akan menjadi biaya, bukan keuntungan. Secara khusus, dalam rasionalitas yang utuh, tidak lagi peduli apakah orang-orang yang mengonsumsi narkoba adalah untuk tujuan psikofarmasologi, untuk tujuan pengobatan, atau hanya untuk terlihat keren; yang paling penting adalah konsumen secara sukarela memilih untuk menggunakan narkoba. Dengan pemikiran yang sama, maka tidaklah peduli apakah obat tersebut adiktif atau bila dikonsumsi akan berdampak negatif terhadap kesehatan dan produktivitas; jika konsumen rasional memilih untuk menerima risiko tersebut, maka mereka pasti sudah berpikir bahwa manfaatnya akan melebihi risiko yang diterima.

Tipe konsumsi yang rasional sejak lama diyakini tidak konsisten dengan beberapa perilaku penggunaan obat-obatan terlarang, seperti kecanduan, menyendiri, ketagihan (mengonsumsi kembali) dan sebagainya. Hasil karya teoritis dari Gary Becker dan Kevin Murphy menunjukkan bahwa tipe konsumsi yang rasional berpotensi konsisten dengan fenomena-fenomena tersebut dan secara empiris telah memiliki beberapa keberhasilan dalam kesesuaian data.²⁵ Hasil tersebut sebenarnya tidak membuktikan bahwa tipe rasional menjelaskan semua hal terkait konsumsi narkoba, tetapi lebih kepada mendorong anggapan bahwa penggunaan narkoba adalah tidak rasional. Dengan kata lain, sulit untuk menyangkal bahwa setidaknya beberapa penggunaan narkoba sesuai dengan tipe rasional. Banyak orang mengaku menikmati kesenangan ketika mengonsumsi ganja, yang lain menikmati hilangnya rasa nyeri atau ketenangan pikiran yang dihasilkan oleh opium; sebagaimana banyak orang lain menikmati stimulasi dari zat kafein. Dengan demikian, setidaknya beberapa pemakaian narkoba adalah suatu hal yang masuk akal dan rasional, menyiratkan bahwa pengurangan akibat pelarangan adalah efek samping dari pelarangan itu sendiri.

Jika sebagian konsumen membuat keputusan irasional terkait penggunaan narkoba, pelarangan mungkin memiliki satu manfaat: mencegah konsumen tersebut dari pemakaian narkoba. Selain kerugian yang diderita konsumen narkoba seringkali dibesar-besarkan, beberapa keputusan untuk menggunakan narkoba mungkin memang keliru.²⁶ Pemakaian narkoba mungkin bertujuan untuk sesuatu yang baik, namun risiko yang diterima mungkin lebih besar terutama pada mereka

yang berpotensi kecanduan dengan kondisi kesehatan yang kompleks. Misalnya, konsumen yang kurang peduli barangkali akan mengabaikan adanya kemungkinan kecanduan dan meremehkan adanya risiko kesehatan yang terkait dengan narkoba. Sebuah kebijakan yang mampu mencegah konsumen irasional tersebut mencoba narkoba, pada prinsipnya, adalah kebijakan yang mampu membuat mereka menjadi lebih baik.²⁷

Argumen pendukung pelarangan ini mungkin tampak masuk akal, tetapi penjelasan lebih lanjut memaparkan kelemahan yang terdapat di dalamnya. Bahkan sekalipun konsumsi irasional merajalela dan kebijakan dapat mencegah perilaku ini, pertanyaan untuk setiap kebijakan tidak saja pada apakah itu menghasilkan sebuah manfaat, tetapi juga apabila diterapkan maka biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang didapat. Jadi, manfaat dari kebijakan atas pengurangan penggunaan narkoba yang irasional harus dipertimbangkan kembali dengan membandingkan pada biaya kebijakan yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan pengurangan tersebut. Salah satu biaya yang mungkin besar adalah upaya untuk mengurangi penggunaan narkoba secara rasional, walaupun sebab-sebab lain juga tentunya.

Bukti-bukti yang kuat menunjukkan bahwa pelarangan memiliki efek samping yang merugikan seperti meningkatnya kejahatan dan korupsi, infeksi HIV yang lebih besar, berkurangnya kebebasan sipil, penerimaan pajak yang berkurang dan biaya implementasi yang mahal bagi polisi, hakim, jaksa dan institusi penjara. Selain itu, pelarangan tidak memiliki dampak yang cukup signifikan dalam mengurangi penggunaan narkoba. Sementara data pasti terkait hal ini tidak tersedia, adalah hal yang masuk akal bahwa konsumen rasional adalah orang-orang yang paling mungkin terusik oleh kebijakan pelarangan. Sementara di sisi lain, konsumen irasional akan mengabaikan pelarangan tersebut. Sehingga hampir tidak terbayangkan bahwa salah satu dampak dari kebijakan pelarangan adalah kelebihan biaya. Bahkan sekalipun konsumen irasional membenarkan kebijakan untuk mengurangi penggunaan narkoba, pelarangan tetap menjadi pilihan terburuk di antara kebijakan tersebut.

Selain masalah di atas, bahaya dari penggunaan narkoba tidak selalu seperti yang dibesar-besarkan. Bahaya narkoba tidak berbeda jauh dengan barang legal lainnya seperti alkohol, tembakau, lemak jenuh dan masih banyak lagi. Bagaimanapun, zat-zat yang legal ini memiliki efek samping jangka panjang yang berdampak pada penyakit serius hingga kematian (seperti sirosis, kanker paru-paru, emfisema, dan penyakit jantung). Namun, pelarangan atas ganja, heroin, kokain, dan obat-obatan terlarang lainnya menunjukkan bahwa barang-barang tersebut tidak dapat diterima karena dinilai "buruk", sementara barang-barang legal lainnya seperti alkohol dan tembakau setidaknya dapat "ditoleransi". Lebih jauh lagi, kebijakan pengurangan terhadap konsumsi narkoba mungkin akan menyebabkan substitusi/ pengganti atas barang legal yang memiliki efek yang sama atau bahkan lebih berbahaya.

“Bukti-bukti yang kuat menunjukkan bahwa pelarangan memiliki efek samping yang merugikan seperti meningkatnya kejahatan dan korupsi, infeksi HIV yang lebih besar, berkurangnya kebebasan sipil, penerimaan pajak yang berkurang dan biaya implementasi yang mahal bagi polisi, hakim, jaksa dan institusi penjara.”

Argumen yang paling penting adalah, pelarangan hampir pasti lebih merugikan pengguna tipe irasional daripada pengguna rasional, mengingat banyak pengguna irasional merupakan konsumen seperti yang lainnya. Pelarangan artinya pengguna harus membeli dari kelompok kriminal yang kemungkinan besar memperdayai mereka, dan seringkali dilakukan di lingkungan yang berbahaya. Pelarangan juga artinya pengguna tidak hanya harus menghadapi risiko kesehatan, namun juga risiko penangkapan, kehilangan izin profesi, kelayakan mendapatkan pinjaman pendidikan, dan masih banyak risiko yang lain.

Tidak hanya itu, pelarangan juga berarti menghadapkan pengguna dalam kesulitan yang kompleks untuk menilai kualitas obat yang mereka beli di pasar gelap, karena konsumen tidak dapat menuntut penjual-produsen atas barang yang rusak, melaporkan kepada lembaga pengawas pemerintah, secara berkelanjutan berlangganan kepada penjual dengan reputasi kualitas produk mereka, atau dapat memberikan testimoni yang negatif kepada penjual produk yang berkualitas buruk. Dengan demikian, secara tidak langsung pelarangan telah menghasilkan peningkatan overdosis dan keracunan. Pelarangan meningkatkan produksi dan biaya penjualan, serta harga obat sebagai akibatnya,²⁸ sehingga pengguna harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk mengonsumsi melalui metode konsumsi yang tidak aman, seperti jarum suntik yang dipakai berulang kali (saling berbagi, tidak steril), dan karenanya menghadapi risiko yang lebih besar atas penularan HIV dan Hepatitis.

Semua dampak negatif yang disebutkan di atas tentu saja mencederai hak konsumen, baik yang rasional maupun irasional, namun pengguna rasional lebih memungkinkan untuk mengenali risiko dan menyesuaikan perilaku mereka untuk mengurangi dampak yang merugikan. Untuk meminimalisasi risiko penangkapan, konsumen yang rasional akan menanam ganjanya sendiri atau membeli obat lain dari pemasok ulang yang diketahuinya. Untuk menghindari risiko tidak steril, konsumen rasional akan membeli dari pemasok yang terpercaya atau mencoba dosis yang kecil pada awalnya, atau menghindari obat-obatan ilegal dan mengganti obat-obatan legal yang tersedia, lalu menggantinya dengan alkohol yang lebih terpercaya. Konsumen rasional akan menghindari penggunaan jarum suntik bekas, baik dengan cara mengganti metode ataupun menggantinya dengan obat lain. Selain itu mereka akan lebih berhasil dalam memperoleh jarum suntik steril dan bersih, baik dari koneksi legal maupun ilegal.

Pelarangan pun dapat merugikan konsumen irasional dengan cara memanipulasi penggunaan narkoba pada kelompok usia yang terlalu muda, naif, ceroboh, atau buta dalam mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, di mana di sisi lain konsumen rasional menghapus citra buruk tersebut. Dalam kebijakan pelarangan, uang hasil bekerja di bisnis perdagangan narkoba sangat tinggi. Namun, hal ini hanyalah sebagai bentuk kompensasi dari meningkatnya risiko cedera, kematian, dan penjara. Konsumen rasional memahami hal tersebut dan lebih siap menerima risiko tersebut apabila total kompensasinya sama dengan apa yang tersedia di sektor lain. Sebagai contoh remaja tanggung, di sisi lain, hanya berfokus pada uang yang didapatkan secara langsung dan menerima tanpa berhati-hati atas risiko kematian maupun penjara. Pelarangan memberikan kesan kepada orang tua yang kurang rasional bahwa kebijakan pelarangan dapat sepenuhnya mencegah penggunaan narkoba pada pemuda. Sebaliknya, orang tua yang rasional menyadari bahwa pelarangan memiliki dampak kecil dalam menghilangkan peredaran narkoba, sehingga mereka harus tetap melakukan intervensi perlindungan pada anak-anak mereka dari pilihan yang ceroboh dan berbahaya.

Dengan demikian, walaupun pelarangan bisa mencegah konsumsi obat-obatan terlarang, kebijakan pelarangan juga mengakibatkan penggunaan yang lebih berbahaya dan lebih mahal bagi mereka yang terbiasa mengonsumsinya. Dampak negatif pelarangan jauh lebih buruk bagi konsumen irasional. Dan karena keseluruhan dampak dari pelarangan terhadap penggunaannya tampak biasa, maka tidak mungkin manfaat umum dari mengurangi konsumen irasional (dengan pelarangan) dapat lebih besar dari meningkatnya dampak negatif bagi yang tetap menggunakan narkoba walaupun ada pelarangan.

Kesimpulan

Kesimpulan dalam membandingkan pengendalian diri oleh individu atau oleh negara dapat berlaku secara luas. Dalam banyak konteks, ketika konsumen membuat keputusan yang keliru, pengendalian oleh negara adalah instrumen yang tumpul untuk memperbaiki keputusan tersebut. Konsumen rasional memahami dampak dari kebijakan pemerintah dan oleh karenanya mampu menyesuaikan perilaku mereka sehingga menekan dampak yang ditimbulkannya. Konsumen irasional, di sisi lain, akan merespon dengan cara-cara yang lebih mahal. Ketika individu diberikan wewenang untuk mengendalikan dan membuat pilihan-pilihan, hal tersebut memang tidak selalu sempurna; karena tidak ada jaminan bahwa semua orang akan selalu membuat keputusan yang baik untuk diri mereka. Namun menggantikan kebebasan individu dengan pengendalian oleh negara umumnya menghasilkan hasil akhir yang jauh lebih buruk; sebuah pendekatan yang memaksakan pilihan tidak optimal pada individu yang rasional dan menciptakan insentif merugikan bagi individu irasional – kebijakan yang salah walaupun awalnya bertujuan untuk melindungi.

Catatan Akhir

1. Saya tidak mengatakan yang mana yang lebih baik, bahwa apakah sikap yang "tidak rasional" adalah paling baik digambarkan sebagai irasional, berpikiran sempit, terkait perilaku, atau hanya "sedikit lebih rendah dari sepenuhnya rasional". Konsep-konsep tersebut saling tumpang tindih, tetapi tidak ekuivalen; bagaimanapun juga, perbedaan-perbedaan di antaranya tidaklah penting untuk didiskusikan di sini. Untuk kajian terkini dari isu-isu tersebut, silakan lihat: Matthew Rabin, "Incorporating Limited Rationality into Economics," *Journal of Economic Literature* 51, no. 2 (2013): 528–543, <http://dx.doi.org/10.1257/jel.51.2.528>.
2. Jeffrey A. Miron, "The Economics of Drug Prohibition and Drug Legalization," *Social Research* (2001): 835–855.
3. Biaya yang lebih tinggi mungkin menjadi bagian dari penyebab profit yang lebih rendah, dan bukan hanya sekedar menyebabkan harga yang lebih tinggi, jika penghalang untuk masuk (seperti ketidaksukaan untuk bekerja di industri yang tidak legal) belum mencegah profit (yang telah disesuaikan menurut risiko, bahaya, dan sebagainya) menjadi mendekati nol.
4. Jeffrey A. Miron, "The Effect of Drug Prohibition on Drug Prices: Evidence from the Markets for Cocaine and Heroin," *Review of Economics and Statistics*, 85, no. 3 (2003): 522–530.
5. Jeffrey A. Miron dan Jeffrey Zwiebel, "Alcohol Consumption During Prohibition," *American Economic Review* 81 (1991): 242–247; Suren Basov, Jeffrey Miron, dan Mireille Jacobson, "Prohibition and the Market for Illegal Drugs," *World Economics* 2, no. 4 (2001): 113–158; Angela K. Dills dan Jeffrey A. Miron, "Alcohol Prohibition and Cirrhosis," *American Law and Economics Review* 6, no. 2 (2004): 285–318; Angela K. Dills, Mireille Jacobson, dan Jeffrey A. Miron, "The Effect of Alcohol Prohibition on Alcohol Consumption: Evidence from Drunkenness Arrests," *Economics Letters* 86, no. 2 (2005): 279–284; Chris Feige dan Jeffrey A. Miron, "The Opium Wars, Opium Legalization, and Opium Consumption in China," *Applied Economics Letters* 15, no. 12 (2008): 911–913; Jeffrey A. Miron, *Marijuana Policy in Colorado* (Cato Institute, 23 Oktober 2014).
6. Jeffrey A. Miron, "Violence, Guns, and Drugs: A Cross-Country Analysis," *Journal of Law and Economics* 44, no. S2; "Guns, Crime, and Safety: A Conference Sponsored by the American Enterprise Institute and the Center for Law, Economics, and Public Policy at Yale Law School" (Oktober 2001): 615–633.
7. Milton Friedman, "The War We Are Losing," in *Searching for Alternatives: Drug-Control Policy in the United States*, ed. Melvyn B. Krauss dan Edward P. Lazear (Stanford, California: Hoover Institution Press, 1991): 53–67; Jeffrey A. Miron, "Violence and the US Prohibitions of Drugs and Alcohol," *American Law and Economics Review* 1, no. 1–2 (Musim Gugur 1999): 78–114. Gambar 1 dibuat kembali dari Gambar 8.17 di Angela S. Dills dan Jeffrey A. Miron, "What Do Economists Know About Crime?" dalam *The Economics of Crime: Lessons for and from Latin America*, eds. Sebastian Edwards, Rafael Di Tella, dan Ernesto Scharfgrudsky (Chicago: University of Chicago Press, 2010).
8. Miron, "Violence, Guns, and Drugs: A Cross-Country Analysis," *Journal of Law and Economics* (2001).
9. Miron, "The Effect of Drug Prohibition on Drug Prices," (2003) berpendapat bahwa efek dari pelarangan pada harga narkoba mungkin adalah lebih kecil dari yang telah diperkirakan di hasil sebelumnya, namun tetap substansial.
10. Bruce L. Benson dan David W. Rasmussen, "Relationship between Illicit Drug Enforcement Policy and Property Crimes," *Contemporary Policy Issues* IX (Oktober 1991): 106–115; Bruce L. Benson et al., "Is Property Crime Caused by Drug Use or by Drug Enforcement Policy?" *Applied Economics* 24 (1992): 679–692.
11. Steven B. Duke dan Albert C. Gross, *America's Longest War: Rethinking Our Tragic Crusade against Drugs* (New York: G. P. Putnam's Sons, 1993): 37–42, 53–54, 64–66, 73–74; *US Department of Justice, Drugs, Crime, and the Justice System: A National Report for the Bureau of Justice Statistics* (Washington DC, 1992): 5.
12. Steven B. Duke, "Drug Prohibition: An Unnatural Disaster," *Connecticut Law Review* 27 (1994): 571. Silakan lihat juga <http://www.independent.co.uk/news/world/europe/portugal-decriminalised-drugs-14-years-ago--and-now-hardly-anyone-dies-from-overdosing-10301780.html>.
13. John P. Morgan, "The Jamaica Ginger Paralysis," *Journal of the American Medical Association* 245, no. 15 (15 Oktober 1982): 1864–1867. Gambar 2 dibuat kembali dari Gambar 1 pada Jeffrey A. Miron dan Jeffrey Zwiebel, "Alcohol Consumption during Prohibition," *American Economic Review* (1991): 242–247.
14. Duke dan Gross. *America's Longest War: Rethinking Our Tragic Crusade against Drugs*.
15. William J. Chambliss, "Another Lost War: The Costs and Consequences of Drug Prohibition," *Social Justice* (1995): 108–111; Randy E. Barnett, "The Harmful Side Effects of Drug Prohibition," *Utah Law Review* (2009): 29–31; Jeffrey A. Miron dan Jeffrey Zwiebel, "The Economic Case against Drug Prohibition," *The Journal of Economic Perspectives* (1995): 175–192.
16. Jeffrey A. Miron dan Katherine Waldo, "The Budgetary Impact of Ending Drug Prohibition," (The Cato Institute, September 2010), <http://ssrn.com/abstract=1710812>.
17. Eric Schlosser, "Reefer Madness," *Atlantic Monthly* (Agustus 1994): 45–63.
18. Andy Greenberg, "Two Charts Show How the Drug War Drives Domestic Spying," *Wired* (17 Juli 2015), <http://www.wired.com/2015/07/drug-war-driving-us-domestic-spying>.
19. Samuel R. Friedman, Theresa Perlis, dan Don C. Des Jarlais, "Laws Prohibiting Over-the-Counter Syringe Sales to Injection Drug Users: Relations to Population Density, HIV Prevalence, and HIV Incidence," *American Journal of Public Health* 91, no. 5 (2001): 791.

-
20. Lester Grinspoon dan James B. Bakalar, *Marijuana: The Forbidden Medicine* (New Haven: Yale University Press, 1993).
21. James Zacny et al., "College on Problems of Drug Dependence Taskforce on Prescription Opioid Non-medical Use and Abuse: Position Statement," *Drug and Alcohol Dependence* 69, no. 3 (2003): 215–232.
22. Robert J. Barro, "To Avoid Repeats of Peru, Legalize Drugs," *Wall Street Journal* (27 April 1992).
23. Miron and Waldo (2010).
24. Pernyataan ini mengabaikan adanya kemungkinan akan efek ke pihak lain dari penggunaan narkoba yang dapat saja muncul bahkan ketika konsumen sedang berpikir dengan rasional. Akan tetapi, terdapat banyak benda yang dapat menyebabkan efek ke pihak lain, dan respon kebijakan yang sesuai adalah yang menargetkan perilaku yang menyebabkan efek ke pihak lain (seperti menyetir di bawah pengaruh alkohol) daripada hanya sekedar melarang benda tersebut sepenuhnya. Oleh karena itu, dengan mengesampingkan adanya efek ke pihak lain, maka semua efek pelarangan adalah negatif jika penggunaannya sedang dalam kondisi berpikir dengan rasional.
25. Gary S. Becker dan Kevin M. Murphy, "A Theory of Rational Addiction," *Journal of Political Economy* 96 (1988): 675–700; Donald S. Kenkel, Robert R. Reed III, dan Ping Wang, *Rational Addiction, Peer Externalities, and Long Run Effects of Public Policy*, no. w9249 (National Bureau of Economic Research, 2002); Michael Grossman dan Frank J. Chaloupka, "The Demand for Cocaine by Young Adults: A Rational Addiction Approach," *Journal of Health Economics* 17, no. 4 (1998): 427–474.
26. Miron dan Zwiebel, *The Journal of Economic Perspectives*; Jeffrey A Miron, "Drug Prohibition" in *The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law*, ed. Peter Newman (London: The Macmillan Press, 1998): 648–652.
27. Kemungkinan dari ketergantungan itu sendiri tidak menjadikan adanya isu khusus bagi kebijakan. Kafein, misalnya, adalah dapat membuat ketergantungan, tetapi hanya terdapat segelintir orang yang menginginkan dilarangnya kopi, teh, dan minuman-minuman bersoda. Risikonya—bagi para konsumen irasional—berasal dari barang-barang pembuat ketergantungan yang memiliki efek samping yang serius, terutama apabila efek tersebut hanya muncul setelah penggunaan untuk waktu yang panjang.
28. Lihat catatan kaki nomor 84 di atas untuk melihat apakah biaya yang lebih tinggi mengindikasikan adanya harga yang lebih tinggi atau profit yang lebih rendah.

TENTANG PENULIS

Jeffrey Miron adalah dosen senior dan direktur program S1 di Departemen Ekonomi Universitas Harvard. Ia juga menjabat sebagai direktur pada studi ekonomi di Cato Institute.

TENTANG CENTER FOR INDONESIAN POLICY STUDIES

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) merupakan lembaga pemikir non-partisan dan non-profit yang bertujuan untuk menyediakan analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan praktis bagi pembuat kebijakan yang ada di dalam lembaga pemerintah eksekutif dan legislatif.

CIPS mendorong reformasi sosial ekonomi berdasarkan kepercayaan bahwa hanya keterbukaan sipil, politik, dan ekonomi yang bisa membuat Indonesia menjadi sejahtera. Kami didukung secara finansial oleh para donatur dan filantropis yang menghargai independensi analisis kami.

AREA FOKUS UTAMA:

Perdagangan dan Kesejahteraan: CIPS menemukan adanya kerugian yang diakibatkan oleh pembatasan ekonomi, dan merumuskan pilihan kebijakan yang memungkinkan masyarakat Indonesia untuk hidup sejahtera dan mampu menjaga kelestarian lingkungan.

Sekolah Swasta Murah: CIPS mengkaji situasi sekolah swasta murah dan bagaimana mereka berkontribusi dalam penyediaan pendidikan berkualitas untuk anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah di Indonesia.

Migrasi Buruh Internasional: CIPS merekomendasikan kebijakan yang memfasilitasi migrasi buruh berkemampuan rendah karena keberadaan mereka sangat penting sebagai sumber pendapatan dan pengembangan kapasitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia.

www.cips-indonesia.org

 facebook.com/cips.indonesia

 [@cips_indonesia](https://twitter.com/cips_indonesia)

 [@cips_id](https://www.instagram.com/cips_id)

Grand Wijaya Center Blok G8 Lt. 3
Jalan Wijaya II
Jakarta Selatan, 12160
Indonesia
Tel: +62 21 27515135